

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Arsyad Azhar, 2011, *Media Pembelajaran*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Defita Wulansari, 2021, *Media Massa Dan Komunikasi*, Semarang: Mutiara Aksara.
- E. Utrech dan Moh. Saleh Djingdang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Cetakan ke-5.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses dan Teknik Pembentukannya)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Kencana.

- Masyhur Effendi, 1993, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana.
- Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Namira Wulandari Nawawi, Nur Azisa, dan Syarif Saddam Rivanie, 2023, *Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana*, Jogjakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia.
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Raihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Pustaka Kartini.
- S.R.Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ke- 1, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wina Sanjaya, 2012, *Media Komunikasi Pembelajaran*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.
- Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-2.
- Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Pustaka Ilmu.

Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta.

**Jurnal :**

Alicia Pangemanan, 2018, *Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan Dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP (Kajian Putusan MA No. 446K/PID/2017)*, Lex Crimen, Volume VII Nomor 3.

Andre G. Mawey, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Lex Crimen, Volume V Nomor 2.

Enny Widyaningsih, Muh. Hasrul, dan Audyna Mayasari Muin, 2021, *Perbuatan Menyerang Nama Baik, Kehormatan, Dan Martabat Seseorang Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hermeneutika, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Fiona L. Pelafu, 2017, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen, Volume VI Nomor 3.

L. Heru Sujamawardi, 2018, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 9 Nomor 2.

Madya Daka Lelana, 2020, *Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang Tindak Pidana Perjudian*, Novum: Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 1.

Syarif Saddam Rivanie, 2016, *Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dokumen Elektronik Milik Orang Lain Di Kota Makassar (Studi Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.MKS)*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

**Kamus :**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

### **Artikel :**

Agus Dwi Prasetyo, *"UU ITE Tak Lindungi Korban Revenge Porn, Komnas Perempuan Desak Revisi"*, jawapos.com, Agustus 2023.

<https://www.jawapos.com/nasional/012434631/uu-ite-tak-lindungi-korban-revenge-porn-komnas-perempuan-desak-revisi>

Dzul Azmi Muhammad, *"Peningkatan KBGO Di Era Digital: Pemenuhan Hak dan Perlindungan Bagi Perempuan Sebagai Korban "Revenge Porn"*, lbhsembada.id, Agustus 2023.

[https://lbhsembada.id/peningkatan-kbgo-di-era-digital-pemenuhan-hak-dan-perlindungan-bagi-perempuan-sebagai-korban-revenge-porn/#\\_edn1](https://lbhsembada.id/peningkatan-kbgo-di-era-digital-pemenuhan-hak-dan-perlindungan-bagi-perempuan-sebagai-korban-revenge-porn/#_edn1)

Raja Eben Lumbanrau, *"Kekerasan Online: Korban Revenge Porn Dimaki, Dicekik, Hingga Konten Intim Disebar – 'saya berkali-kali mencoba bunuh diri'*", bbc.com, April 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820>

Raju Ade Rahman, *"Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif Hingga 17 September 2023"*, aptika.kominfo.go.id, September 2023.

<https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/kominfo-tangani-37-juta-konten-negatif-hingga-17-september-2023/>

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.